



JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595
Volume 7 No 2 Juli 2018

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera
Taufiqur Rahman , I Wayan Suparta , Arivina Ratih Taher

Pengaruh Belanja Pegawai, *Mandatory Spending*, Dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Space* Seluruh Provinsi
Di Sumatera
Aditia Rinaldi , Marselina, I Wayan Suparta

Dampak Ekspor Dan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Di Indonesia Periode 1980 Hingga 2015
Ferri Kuswantoro

The Effect Of Government Governance And *Tax Ratio* To
Economic Growth (Case Study In Asean Countries)
Finidya Demarani

Nilai Tambah Pada Industri Ikan Kering Tipis Di Juata Laut
Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati

Model Data Panel Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah
Irma Febriana MK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145
e-mail : jepep.feb@gmail.com
website : ep.feb.unila.ac.id

Pengaruh Belanja Pegawai, *Mandatory Spending*, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Space* Seluruh Provinsi Di Sumatera

Aditia Rinaldi ¹⁾, Marselina ²⁾, I Wayan Suparta³⁾
Mahasiswa ¹⁾, Dosen Pembimbing Utama ²⁾, Dosen Penguji Utama ³⁾

Abstract

Fiscal space is government space to allocate funds for investment and development, the space will be more limited if the proportion of state budget is binding.

This study aims to analyze the effect of personnel expenditure, mandatory spending on education, mandatory spending on health, and economic growth to fiscal space in Sumatra during 2011 to 2015. Ordinary least squares (OLS) method were used to gain the data. The data used are panel data, which is a combination of time series and cross-section data.

Based on the estimated value, coefficient regression of personnel expenditure is - 0.616776 with confidence level of 95%. It means that every one percent increasing of personnel expenditure, the fiscal space will decrease -0.61 percent, ceteris paribus, coefficient regression value of mandatory spending on education is 0.430530 with confidence level of 95%. It means that every one percent increasing of mandatory spending on education, the fiscal space will increase 0.43 percent, ceteris paribus, coefficient regression of mandatory spending on health is 0.681571 with confidence level of 95%. It means that every one percent increasing of mandatory spending on health, the fiscal space will increase 0.68 percent, ceteris paribus, coefficient regression of economic growth is 1.475030 with confidence level of 95%. It means that every one percent increasing of economic growth, the fiscal space will increase 1.47 percent.

Keywords: *Fiscal Space*, personnel expenditures, *Mandatory Spending* Education, *Mandatory Health Spending*, Economic Growth.

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan-kebijakan yang tercermin dari komposisi belanjanya, APBN

diharapkan mampu melakukan ekspansi yang dapat menstimulus kegiatan ekonomi yang lebih produktif sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kemampuan APBN melakukan ekspansi bergantung pada seberapa besar *fiscal space* yang dimilikinya,

atau dengan kata lain, *fiscal space* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan APBN bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

fiscal space akan mempengaruhi kesinambungan fiskal di masa-masa mendatang. Hal ini menjadi suatu yang logis karena kesinambungan fiskal bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memobilisasi penerimaan, pembiayaan defisit maupun penajaman dan efisiensi belanja, yang berarti upaya memupuk *fiscal space*. *fiscal space* secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. Dalam konteks APBN, *Fiscal space* adalah total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah.

Belanja pegawai yang meningkat signifikan di era otonomi ini

dikarenakan daerah diberikan kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk merekrut dan membayar gaji pegawai. Beban yang tinggi untuk membayar gaji pegawai ini menyebabkan *fiscal space* atau keleluasaan anggaran pemerintah daerah untuk dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif berkurang, karena sebagian besar terserap di belanja gaji. Secara nasional, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun, jumlah ini mengalami peningkatan 13,6 persen (Rp 28,9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun.

Belanja *mandatory* lebih besar dari belanja *non mandatory*. Walaupun tingkat belanja *mandatory* dari tahun 2008 sampai dengan 2012 semakin menurun akan tetapi tingkatnya masih cukup besar jika dibandingkan tingkat belanja *non mandatory*. Jumlah belanja *mandatory* berkisar antara 75,4 persen sampai dengan 82,2 persen sementara jumlah belanja *non mandatory* berkisar antara 17,8 persen sampai dengan 24,6 persen pada anggaran ini dapat

menyebabkan *fiscal space* yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan tertekan. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan belanja lainnya yang berkualitas dan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian daerah.

Peningkatan kualitas belanja daerah demi terwujudnya kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan nasional tertuang dalam esensi strategi belanja daerah. APBN 2013 mensyaratkan bahwa belanja negara/daerah diarahkan pada empat pilar, yaitu: (1) mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (*pro growth*); (2) meningkatkan produktivitas dalam kerangka perluasan kesempatan kerja (*pro job*); (3) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (*pro poor*); dan (4) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro environment*). Langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*), antara lain dengan lebih memperhatikan efisiensi, dan ketepatan alokasi, serta memperhitungkan

pengaruhnya terhadap perekonomian termasuk pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi akibat keterbatasan anggaran daerah untuk mengeksploitasi dan menyebarkannya menyebabkan pendapatan daerah bervariasi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi diciptakan dari pertumbuhan sektor-sektor daerah. Agar sektor-sektor ekonomi bertumbuh perlu adanya perhatian pemerintah untuk menyebarkannya melalui pemberian modal, bantuan permodalan bagi industri daerah, penanaman modal, bantuan pemasaran dan lain-lain. Iskandar (2012) menemukan bahwa yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan *fiscal space* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara berpengaruh signifikan terhadap *fiscal space* pertumbuhan

ekonomi yang tinggi menyebabkan ruang gerak anggaran pemerintah tertekan.

Dengan demikian fenomena *fiscal space* yang terjadi menunjukkan bahwa ruang gerak pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor prioritas akan terpengaruh oleh alokasi besarnya belanja daerah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian seberapa besar pengaruh belanja pegawai, *mandatory spending* dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi *fiscal space* di daerah, rumusan masalah adalah : 1) Seberapa besar belanja pegawai berpengaruh terhadap *fiscal space*?, 2) Seberapa besar *mandatory spending* berpengaruh terhadap *fiscal space*?, 3) Seberapa besar pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal space*?, 4) Bagaimanakah pengaruh belanja pegawai, *mandatory spending* dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal space*? Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pegawai terhadap *fiscal*

space, 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *mandatory spending* terhadap *fiscal space*, 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal space*, 4) Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja pegawai, *mandatory spending* dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal space*.

Kerangka Pemikiran

Belanja Pegawai termasuk belanja yang cukup besar dan terus meningkat, bila pada tahun 2006 hanya 73,2 triliun (17%), maka pada tahun tahun 2012 angkanya mencapai Rp215,8 triliun atau 22% dari total Belanja Pemerintah Pusat. Dalam komponen Belanja pegawai ada 3 (tiga) komponen utama yaitu Gaji dan tunjangan, Honorarium dan vakasi, dan kontribusi sosial. Dari ketiga komponen Belanja Pegawai yang paling besar adalah Gaji dan Tunjangan (49%), diikuti dengan Kontribusi Sosial (32%), dan honorarium dan vakasi sebesar 19% dari belanja pegawai.

Dalam APBN tahun 2012, belanja pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya yakni Rp215,8 triliun, diikuti dengan subsidi Rp208,8 triliun, belanja barang Rp188,0

triliun, belanja modal Rp151,9 triliun, dan terakhir bantuan sosial Rp47,7 triliun dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain berdampak langsung terhadap APBD juga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran transfer ke daerah. Hal ini disebabkan salah satu komponen penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah alokasi dasar yang mencakup jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dapat disimpulkan jika semakin besarnya belanja pegawai maka jumlah anggaran APBN/APBD yang dikeluarkan akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pengeluaran anggaran APBN/APBD inilah diduga akan menimbulkan tekanan terhadap ruang fiskal (*fiscal space*), tekanan yang terjadi membuat ruang fiskal semakin sedikit.

Dalam menyusun APBN yang perlu juga dipertimbangkan adalah adanya risiko fiskal, dimana risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap anggaran. Pada APBN 2013, risiko fiskal dikelompokkan

dalam empat kategori salah satunya risiko pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*).

mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. *Mandatory spending* itu sendiri merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negaranya yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar umum.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/ lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Kementerian keuangan (2014) Dari tahun 2010-2015, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp127,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp254,9 triliun pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah sebagian besar disalurkan melalui DAU, Tunjangan Profesi Guru dan BOS.

Dalam APBN 2016, anggaran fungsi kesehatan mengalami kenaikan menjadi 5,05 persen dalam APBN 2016. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2016 dalam APBN adalah Rp 109 triliun (5,05 persen dari APBN) atau naik daripada tahun 2015 yang Rp 75 triliun (3,45 persen dari APBN). Itu termasuk iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2016 Rp 74,8 triliun (3,7 persen APBN).

Peningkatan tersebut disebabkan penetapan besarnya *mandatory spending* tersebut adalah persentase dari APBD, sehingga semakin besar jumlah APBD maka semakin besar pula jumlah

mandatory spending yang harus dikeluarkan dari seluruh dana APBD.

Dapat disimpulkan jika semakin meningkat *mandatory spending* maka jumlah dana APBD yang dikeluarkan akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pengeluaran APBD inilah diduga akan menekan ruang fiskal (*fiscal space*).tekanan yang terjadi membuat ruang fiskal semakin sedikit.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output. Rustiyono (2012) Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan perubahan kinerja perekonomian negara. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke

tahun dapat dilihat dari pdb rill atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan yang positif mencerminkan adanya peningkatan dalam perekonomian. Sebaliknya, jika pertumbuhan yang negatif merefleksikan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan ruang gerak pemerintah untuk mengalokasikan anggrannya ke sektor-sektor prioritas hal ini menunjukkan adanya *Fiscal space* yang meningkat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Digunakan data sekunder yang berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera Tahun 2011-2015. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Batasan Variabel

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pementukan modal. Menurut DJPK pengukuran belanja pegawai adalah :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Sumber: DJPK – KEMENKEU RI (2011)

b. Mandatory Spending

Definisi *Mandatory spending* dalam APBN adalah pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja negara sendiri dari sisi peruntukannya terbagi menjadi *mandatory spending* dan belanja diskresioner. Merujuk pada Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010, *mandatory spending* adalah belanja pegawai, pembayaran cicilan dan

bunga hutang, subsidi dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Sedangkan belanja *diskretioner* ini diperoleh dari hasil pengurangan total belanja pemerintah dengan *mandatory spending* pemerintah. Selisih lebih inilah yang dikenal sebagai *fiscal space* pemerintah, yaitu ketersediaan dana pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan, seperti proyek-proyek infrastruktur.

Mandatory spending sebagai pengeluaran yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pengeluaran ini yang dalam undang-undang telah diatur berapa besarnya dalam persentase, Helbra .dkk (2013). Pada perkembangannya *mandatory spending* ini semakin luas dengan keluarnya kebijakan pematokan anggaran sebagai penerapan amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang kemudian diturunkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk fungsi pendidikan. *Mandatory spending* ini terus berkembang dengan keluarnya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan Pasal 171 ayat 1 yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya minimal 5% dari APBD untuk fungsi Kesehatan.

Mandatory spending dalam APBD mengatur mengenai:

1. Belanja Fungsi Pendidikan

Undang-undang dasar 1945 amandemen ke 4 khususnya pasal 31 ayat 4 mengatur untuk mengalokasikan belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD. Data belanja fungsi pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap total APBD di seluruh provinsi Sumatera tahun anggaran 2011-2015.

$$MS_PND = \frac{\text{pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan}}{\text{Total APBD}_t} \times 100$$

Data belanja fungsi pendidikan diperoleh dari direktorat jenderal perimbangan keuangan yang diolah. Satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase.

2. Belanja Fungsi Kesehatan

Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 ayat 2 dijelaskan bahwa besar anggaran kesehatan

pemerintah daerah provinsi dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. Data belanja fungsi kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap total APBD diseluruh provinsi di sumatera tahun anggaran 2011-2015.

$$MS_KST = \frac{\text{pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan}_t}{\text{Total APBD}_t} \times 100$$

Data belanja fungsi kesehatan diperoleh dari direktorat jendral perimbangan keuangan yang diolah. Satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase.

c. *Fiscal Space*

Fiscal Space secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan Pemerintah. *Fiscal Space* merupakan salah satu indikator yang dilihat terkait dengan kesehatan keuangan daerah. Indikator *Fiscal Space* dapat mengetahui seberapa besar *Fiscal Space* atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam

menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Semakin besar rasionya, berarti *Fiscal Space* atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang didanai juga semakin besar. Dalam penelitian ini perhitungan ruang fiskal menggunakan rumusan pertumbuhan APBD yang menggunakan selisih antara APBD_t dengan APBD_{t-1} menggambarkan besaran keleluasaan pemerintah untuk mengalokasikan dananya pada APBD_t tersebut.

$$RF = \frac{(\text{APBD}_t - \text{APBD}_{t-1})}{\text{APBD}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Kementerian Keuangan (2011)

Keterangan:

RF: Fiscal space

APBD_t: APBD periode t

APBD_{t-1}: APBD periode t-1

d. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto/PDRB diukur berdasarkan PDRB Harga Konstan.

$$PE(t) = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Haryadi (2002)

Keterangan:

PE (t) = Pertumbuhan Ekonomi periode t

PDRB_t = PDRB periode t

PDRB_{t-1} = PDRB periode t-1

Estimasi Model Regresi dengan Panel Data

Penelitian mengenai pengaruh mandatory spending dan belanja pegawai terhadap fiscal stress se Sumatera, menggunakan data time-series selama empat tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2011-2015 dan data cross section sebanyak 10 data mewakili Provinsi se Sumatera. Kombinasi menghasilkan 50 observasi dengan fungsi persamaan model panelnya dapat dituliskan sebagai berikut

$$RF_{it} = \beta_0 + \beta_1 Bp_{it} + \beta_2 Ms_PND_{it} + \beta_3 Ms_KST_{it} + \beta_4 Pe_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

RF : Fiscal space(%).

Bp : Belanja pegawai(%).

Ms_PND: Mandatory spending pendidikan(%).

Ms_KST: Mandatory spending kesehatan(%).

Pe : Pertumbuhan Ekonomi(%).

β_0 : intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi variabel bebas

e_{it} : komponen error di waktu t untuk unit cross section i

i : (provinsi se Sumatera)

t : (tahun 2011-2015)

Spesifikasi Test), dalam penelitian ini persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *random Effect*

Hasil Estimasi Panel Data dengan *Random Effect*

Dependent Variable: RF?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/09/17 Time: 21:35

Sample: 2011 2015

Included observations: 5

Cross-sections included: 10

Total pool (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | P |
|------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 19.01801 | 7.702749 | 2.468991 | 0.0180 |
| BP? | -0.616776 | 0.117762 | -5.237497 | 0.0000 |
| PE? | 1.959986 | 0.935635 | 2.094821 | 0.0410 |
| MS_PND? | 0.430530 | 0.427754 | 1.006490 | 0.3150 |
| MS_KST? | 0.681571 | 0.490904 | 1.388399 | 0.1660 |
| Random Effects (Cross) | | | | |
| _SUMUT--C | 5.099936 | | | |
| _SUMSEL--C | 1.370050 | | | |
| _SUMBAR--C | -0.781680 | | | |
| _RIAU--C | 2.315186 | | | |
| _JAMBI--C | -0.943928 | | | |
| _ACEH--C | -1.793072 | | | |
| _LAMPUNG--C | 1.951382 | | | |
| _BENGKULU--C | -1.006863 | | | |
| _BBELITUNG--C | -1.380374 | | | |
| _KEPRIAU--C | -4.830638 | | | |

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Estimasi Hasil Regresi Metode Panel Data dengan Pendekatan *Random Effect*

Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, sesuai dengan hasil uji spesifikasi Hausman (*Hausman*

Hasil Uji Parsial (Uji t-statistik)

| Variabel | Koefisien | t-statistik | t-tabel | Probabilitas | Kesimpulan |
|----------|-----------|-------------|---------|--------------|----------------|
| BP | -0.616776 | -5.237497 | 1.67591 | 0.0000 | Menolak H_0 |
| MS_PND | 0.430530 | 1.006490 | 1.67591 | 0.3196 | Menerima H_0 |
| MS_KST | 0.681571 | 1.388399 | 1.67591 | 0.1719 | Menerima H_0 |
| PE | 1.475030 | 2.094821 | 1.67591 | 0.0418 | Menolak H_0 |

Sumber: Hasil estimasi menggunakan Eviews 9

Variabel Belanja Pegawai

Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk Belanja pegawai sebesar -5.237497. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-tabel 1.67591 pada tingkat signifikansi 5% dan df (*degree of freedom*) = 50. dengan demikian t hitung > t tabel sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara BP dengan *fiscal space* (RF) di seluruh provinsi Sumatera.

Variabel *Mandatory Spending* Pendidikan

Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk variabel MS_PND sebesar 1.006490. Nilai ini

lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t-tabel 1.67591 pada tingkat signifikansi 5% dan df (*degree of freedom*) = 50. dengan demikian t hitung < t tabel sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara MS_PND dengan *fiscal space* (RF) di seluruh provinsi Sumatera.

Variabel *Mandatory Spending* Kesehatan

Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk variabel MS_KST sebesar 1.388399. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t-tabel 1.67591 pada tingkat signifikansi 5% dan df (*degree of freedom*) = 50. dengan demikian t hitung < t tabel sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara MS_KST dengan *fiscal space* (RF) di seluruh provinsi Sumatera.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil penghitungan regresi diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PE sebesar 2.094821. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-tabel 1.67591 pada tingkat signifikansi 5% dan df (*degree of freedom*) = 50. dengan demikian t hitung > t tabel sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan

antara PE dengan *fiscal space* (RF) di seluruh provinsi Sumatera.

Hasil Uji F-Statistik

| Df=(k-1;n-k) | α | F-tabel | F-Statistik | Kesimpulan |
|--------------|----------|---------|-------------|----------------|
| (3;46) | 5% | 2.81 | 6.914202 | Menerima H_a |

Sumber: Hasil estimasi menggunakan Eviews 9

diperoleh nilai F-statistik sebesar 6.914202. Nilai F-statistik ini lebih besar dibandingkan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi (α) 5%, sehingga H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable Belanja pegawai, *Mandatory spending* pendidikan, *Mandatory spending* kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Fiscal Space* seluruh provinsi di Sumatera.

Kesimpulan

Dari variabel – variabel bebas yang ada dalam penelitian ini variabel yang paling mempengaruhi *fiscal space* adalah belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil estimasi regresi data panel diketahui bahwa variabel BP memiliki koefisien regresi sebesar -

0.616776 (bernilai negatif), menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan kenaikan persentase BP sebesar 1% (*ceteris paribus*) maka akan menyebabkan perubahan *fiscal space* sebesar - 0.61 persen. Dari hasil ini juga membuktikan belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap *fiscal space* sesuai dengan teori yang menyatakan Belanja pegawai yang meningkat signifikan di era otonomi ini dikarenakan daerah diberikan kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk merekrut dan membayar gaji pegawai. Beban yang tinggi untuk membayar gaji pegawai ini menyebabkan keleluasaan anggaran pemerintah daerah untuk dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif berkurang, karena sebagian besar terserap di belanja gaji, akibatnya *fiscal space* menjadi tertekan. Dan regresi Pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1.475030 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti apabila Pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka *fiscal space* akan meningkat 1.47 persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh provinsi di Sumatera rata-rata pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 5 persen,

menunjukkan bahwa ruang gerak pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor prioritas akan terpengaruh.

Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga

Daftar Pustaka

Amir, Hidayat. 2013. *Mandatory spending dan rigiditas fiskal*. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Jeffrey I. Chapman. 1999. *Local Government, Fiscal Autonomy and Fiscal Stress: The Case of California*. journal The Case of California. Working Paper.

Lincoln Institute of Land Policy. Lincoln Institute Product Code: WP99JC1

Muda, Iskandar. 2012. *Varabel yang mempengaruhi fiskal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. Jurnal keuangan & Bisnis Volume 4 No.1, Maret 2012

Moeis Irsan A. Ahmad. 2012. *Tesis Pengaruh Besaran Ruang Fiskal Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1984-2010*. Jakarta. 103 hlm.

Purnaninthesa. Anggita. 2006. *Analisis Pengaruh fiscal stress terhadap tingkat Pembiayaan Daerah, Mobilisasi Daerah, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi

Aditia Rinaldi, Marselina, I Wayan Suparta

*Pengaruh Belanja Pegawai, Mandatory Spending, Dan Pertumbuhan
Ekonomi Terhadap Fiscal Space Seluruh Provinsi Di Sumatera ”*